

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan alam, memiliki banyak pulau yang masing-masing mempunyai kelebihan. Sehingga, beberapa negara lain melihat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan potensi. Sumber daya alam dan kekayaan yang melimpah dapat menjadi tonggak penting dalam dominasi Indonesia dan menjadi pendapatan negara. Tentu saja, sebagai penduduk negara dengan sumber daya alam yang melimpah, kita perlu melestarikan kekayaan alam negara tersebut dan melestarikan seluruh potensi yang dimiliki setiap daerah sekaligus mencegahnya agar tidak cepat tergerus, baik potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam, industri kreatif maupun pertambangan.

Sejak tahun 2020 hingga akhir tahun 2021, virus covid-19 masuk ke Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami depresiasi atau penurunan akibat covid-19 pada awal tahun 2020, namun mampu pulih kembali pada Agustus 2021. Hal ini dikarenakan salah satu upaya pemerintah untuk menangani covid-19 adalah dengan mendorong pembangunan ekonomi. Tujuan pertumbuhan ekonomi yaitu untuk mengoptimalkan taraf hidup individu. Individu perlu menciptakan perencanaan, upaya serta tindakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, misalnya seperti meningkatkan kesempatan kerja, pendistribusian pendapatan masyarakat secara adil dan menumbuhkan ikatan regional melalui perubahan aktivitas

ekonomi dari primer lalu sekunder dan kemudian ke tersier (Wijaya & Marseto, 2022).

Menurut (Arsyad, 2015) pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses yang mengarah pada kenaikan jangka panjang pada pendapatan riil per kapita penduduk di suatu negara, disertai dengan penyempurnaan sistem kelembagaan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi memiliki unsur dan ciri-ciri berikut: 1. Sebuah proses yang melibatkan perubahan secara terus-menerus. 2. Upaya mengoptimalkan pendapatan per kapita. 3. Dalam peningkatan pendapatan perkapita perlu dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. 4. Memperbaiki sistem kelembagaan pada segala bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dll).

Pembangunan ekonomi daerah tidak terlepas dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Sehingga, diperlukan kerjasama pihak swasta dengan pemerintah dalam menyusun rencana dan mengembangkan perekonomian daerah guna mencapai pembangunan nasional yang baik. Pada perencanaan daerah perlu memerhatikan kemampuan dalam analisis potensi daerah yang kuat untuk mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang perlu dikembangkan agar dapat berkontribusi pada perkembangan sektor dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pesat (Mahaesa & Huda, 2022).

Menurut (Agma, 2015) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perkembangan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang memfasilitasi kinerja

yang lebih baik di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Menurut (Nankeni & Muljaningsih, 2022), diperlukan juga parameter pertumbuhan ekonomi untuk memperkirakan output ekonomi suatu daerah, di antaranya dengan PDRB. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pengoptimalan kualitas produksi pada suatu perekonomian negara yang direalisasikan dalam wujud peningkatan pendapatan nasional. Suatu negara dapat dikatakan mengalami peningkatan ekonomi jika GNP (*Gross National Product*) riil dari negara tersebut mengalami kenaikan. Terjadinya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kemajuan pembangunan ekonomi.

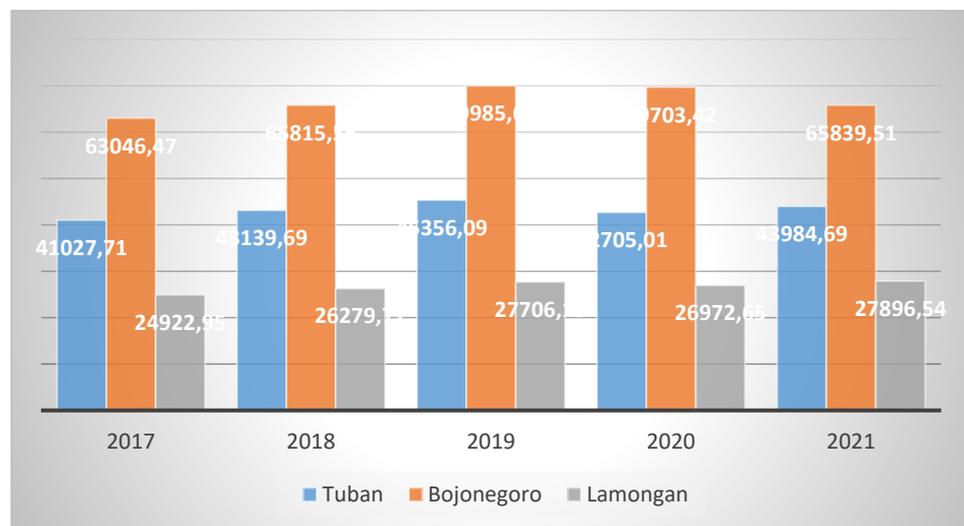
Menurut Nankeni & Muljaningsih (2022) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah merupakan gambaran dari kemampuan wilayah tersebut dalam mengendalikan sumber daya alamnya. Setiap wilayah atau daerah memiliki tingkat pendapatan domestik bruto yang berbeda karena pengaruh kapasitas produksi dan sumber daya alam dari daerah tersebut.

Suatu tindakan perencanaan pembangunan guna menumbuhkan ekonomi diawali dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial di wilayah tersebut. Pada perencanaan pembangunan memerlukan beraneka ragam informasi statistik sebagai landasan untuk menentukan program agar berhasil mencapai tujuan pembangunan. Terdapat dua faktor utama yang perlu ditekankan ketika mengenali kemampuan aktivitas ekonomi daerah, antara lain: 1. Sektor ekonomi yang berdaya saing atau memiliki potensi pada periode terakhir dan berpotensi menjadi sektor ekonomi pada

masa yang akan datang. 2. Sektor ekonomi yang mungkin berkembang di masa depan (walaupun saat ini belum mempunyai peringkat daya saing yang memadai). Dengan diketahui bahwa potensi kegiatan ekonomi di suatu wilayah memungkinkan kita untuk merumuskan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi (Rizani, 2019).

Kondisi secara umum di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan Provinsi Jawa Timur secara geografis dan ekonomi hampir sama karena data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan beberapa perkembangan di masing-masing wilayah. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 1.1 Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Ketiga Kabupaten tersebut mempunyai perbedaan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup jauh, terlihat bahwa PDRB atas harga konstan di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan

Kabupaten Lamongan sempat mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2017-2019 PDRB Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar Rp 2.651,08 dan mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 1.279,68 pada tahun 2021. Untuk Kabupaten Bojonegoro, PDRB pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 282,26 dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar Rp 3863,91. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan, pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan sebesar Rp 733,5 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 923,89.

Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan berada di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbesar di antara enam provinsi lainnya di Pulau Jawa dan juga termasuk provinsi terpadat dengan kepadatan penduduk sejumlah 851 jiwa/km. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Kawasan strategis yang dimaksud salah satunya terdiri dari kawasan segitiga emas perumbuhan yang meliputi wilayah Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Untuk merumuskan rencana pembangunan oleh pemerintah, perhatian yang cukup serius harus diberikan pada potensi daerah yang dimiliki dari ketiga daerah tersebut. Karena potensi sektor ekonomi yang dimiliki daerah tersebut berbeda-beda,

maka dibutuhkan penelitian dan studi lebih lanjut yang berkesinambungan supaya pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan lebih cepat.

Berdasarkan uraian di atas maka dibutuhkan suatu penelitian guna melihat potensi dan identifikasi sektor-sektor ekonomi daerah Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan penerapan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Peneliti mengambil judul “Analisis Potensi Sektor Ekonomi di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan dengan Menggunakan LQ, *Shift Share*, *Tipology Klassen* dan *Multiplier Effect*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Sektor ekonomi manakah yang menjadi sektor basis di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan?
2. Sektor ekonomi mana di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur?
3. Sektor ekonomi mana yang tumbuh relatif cepat di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan?
4. Sektor ekonomi apa yang lebih optimal dalam memberikan keuntungan di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan?
5. Bagaimana *tipology klassen* pada setiap sektor di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan?

6. Bagaimana besarnya angka pengganda (*multiplier effect*) pertumbuhan sektor basis terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan.
2. Untuk mengetahui sektor ekonomi di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang tumbuh relatif cepat di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan.
4. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang lebih optimal dalam memberikan keuntungan di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan.
5. Untuk mengetahui *tipology klassen* pada setiap sektor di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan.
6. Untuk mengetahui besarnya angka pengganda (*multiplier effect*) pertumbuhan sektor basis terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik

(BPS) antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan. Alat analisis yang digunakan yaitu *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share (SS)*, *Tipology Klassen* dan *Multiplier Effect*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan PDRB Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini.
2. Dapat dijadikan sebagai acuan dan mengetahui permasalahan tentang perkembangan daerah dalam PDRB sektor pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan.
3. Sebagai literatur di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Sebagai bahan masukan guna dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan mengenai pembangunan daerah khususnya Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan.